

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori Signal (*Signaling Theory*)

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Halim dan Abdullah (2006) teori keagenan merupakan teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (pendelegasian wewenang). Menurut Lane (2002) dalam Halim dan Abdullah (2006) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Dalam hubungan prinsipal dan agen terdapat permasalahan kontraktual seperti adanya ketidakseimbangan informasi atau *asymmetric information*, yang mana informasi tidak seimbang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen.

Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini dapat dilihat dari hubungan antara agen dan principal. Pada penelitian ini pemerintah sebagai *agent* yang memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas semua pengelolaan sumber daya yang dikelolanya, sedangkan masyarakat sebagai prinsipal yang memberikan wewenang pengaturan kepada *agent*, memberikan sumber daya kepada *agent* (dalam bentuk pajak dan lain sebagainya), serta memiliki hak untuk mengetahui penggunaan sumber daya dan mengevaluasi apakah pemerintah telah mengelola keuangan daerah secara tepat dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Teori Signal (*Signaling Theory*)

Teori signal merupakan pengembangan dari teori keagenan dan pada dasarnya untuk mengurangi masalah *asymmetric information* (Spence,1973) dalam Amalina (2018). Teori signal mengemukakan bagaimana seharusnya pemerintah memberikan informasi kepada pihak pengguna laporan keuangan.

Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan. Kaitan antara teori signal dengan penelitian ini mengenai pentingnya memberikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi masalah mengenai ketidakseimbangan informasi. Salah satu informasi yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu laporan keuangan tahunan. Informasi laporan keuangan ini dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2.2 Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP, pada Pernyataan No 01, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Berdasarkan PSAP No.1 paragraf 9 (PP No.71 tahun 2010) disebutkan bahwa:

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posiskeuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dari kutipan tersebut dapat dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pencapaian pemerintah atas tujuan yang telah ditetapkan.

Pada PSAP Nomor 01 yang tercantum pada PP Nomor 71 tahun 2010, menjelaskan bahwa laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Berdasarkan PSAP No 01 Paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen terdiri dari tujuh laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah pada periode tertentu.

- f. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan rincian angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. CaLK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Menurut Sande (2013) penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Definisi ini selaras dengan penelitian Mudjiyono (2019) yang menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif yang tertera pada PP No 71 Tahun 2010 pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD sebagai entitas pelaporan wajib menyusun, menyajikan, dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nurmuthmainnah, 2015).

2.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016 adalah hal dapat dijadikan akses. Menurut Hehanussa (2015) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan pemerintah untuk memberikan akses bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari UU No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, pada pasal 2 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan dengan cara memberikan kemudahan kepada pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet). Menurut Sande (2013) pemerintah daerah harus memenuhi:

- a. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan.
- b. Kemudahan, yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan daerah.
- c. *Accesbile*, yaitu masyarakat dapat mengakses dengan mudah laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

2.4 Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 10 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 pada Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Kompetensi menurut *International Federation of Accountants* (2014) dalam *IAESB: Handbook of International Education Pronouncements* menyatakan bahwa:

Competence is defined as the ability to perform a work role to a defined standard with reference to working environments. To demonstrate competence in a role, a professional accountant must possess the necessary (a) professional knowledge, (b) professional skills, and (c) professional values, ethics, and attitudes. (p.11)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan peran pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja. Untuk menunjukkan kompetensi sesuai peranannya, seorang akuntan profesional harus memiliki (a) pengetahuan profesional yang diperlukan, (b) keterampilan profesional, dan (c) nilai, etika, dan sikap profesional.

Aparatur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri); negara alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari; pemerintah pegawai negeri; alat negara; aparatur negara.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 yang diperbarui dengan UU No 9 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pengertian perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan profesi yang dijalani untuk pekerjaan dan tanggung jawab dengan dilandasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pegawai demi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Wyatt (2003) dalam Rustiana (2017) bahwa terdapat tiga karakteristik kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terdiri atas:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Ilmu atau

informasi yang dimiliki seseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi pemerintahan.

2. Keterampilan (*skill*)

Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. Selain pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.

3. Sikap (*attitude*)

Pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan pemerintahan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pemerintah daerah sangat memerlukan PNS yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki jiwa berkompetisi yang sportif sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. PNS yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi (keuangan) dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti kompetensi PNS di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Menurut SAP PP No.71 Tahun 2010 pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Sande, 2013). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pemerintah daerah harus memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporannya sehingga tuntutan masyarakat mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah terlaksana dengan optimal.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dasar acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang (Mustafa, 2012)	X_1 = Penyajian Laporan Keuangan X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Analisis Linear Berganda	Menggunakan variabel yang sama yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1. Penelitian terdahulu hanya menggunakan dua variabel X , sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel X dengan menambahkan variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah. 2. Penelitian terdahulu menggunakan Kabupaten Pematang sebagai objek penelitian, sedangkan objek penelitian ini menggunakan Provinsi Sumatera Selatan.	1. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2.	Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Sande, 2013)	X_1 = Penyajian Laporan Keuangan X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Menggunakan analisis linear berganda dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis	Variabel independen dan dependen yang sama yaitu penyajian, aksesibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	1. Perbedaan terletak pada jumlah variabel X, dan pada objek penelitiannya. 2. Objek penelitian penelitian terdahulu pada Provinsi Sumatera Barat, sedangkan pada penelitian ini di Provinsi Sumatera Selatan.	1. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang). (Somad, 2016)	X_1 = Penyajian Laporan Keuangan X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Menggunakan analisis linear berganda dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis	Menggunakan variabel yang sama yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Perbedaannya terletak pada jumlah variabel X dan objek penelitiannya.	1. penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
4.	Determinan Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Anim & Sutrisna, 2016)	X_1 = Aksesibilitas Laporan Keuangan X_2 = Penyajian Laporan Keuangan	Menggunakan analisis linear berganda dengan uji instrumen, uji asumsi klasik dan uji hipotesis	X_1 = Aksesibilitas Laporan Keuangan X_2 = Penyajian Laporan Keuangan	Objek Penelitian pada Pemerintah Kota Makassar, sedangkan pada penelitian ini bertempat di Provinsi Sumatera Selatan.	1. Aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

No	Judul dan Nama Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		
5.	Pengaruh Kualitas, Penyajian, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Amalina, 2018)	X ₁ = Kualitas Laporan Keuangan X ₂ = Penyajian Laporan Keuangan X ₃ = Aksesibilitas Laporan Keuangan Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Metode analisis linear berganda dengan uji kualitas data, asumsi klasik dan hipotesis	X ₂ = Penyajian Laporan Keuangan X ₃ = Aksesibilitas Laporan Keuangan Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	X ₁ = Kualitas Laporan Keuangan Objek Penelitian pada BKD Kota Batu, sedangkan pada penelitian ini di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.	1. Kualitas, penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. kualitas, penyajian, dan aksesibilitas berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
6.	Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua (Asrida, Asnawi, & Fallah, 2018)	X ₁ = Kualitas Sumber Daya Manusia X ₂ = Pemanfaatan Teknologi Informasi X ₃ = Tekanan Eksternal Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Menggunakan uji analisis deskriptif dan analisis linear berganda	Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	X ₁ = Kualitas Sumber Daya Manusia X ₂ = Pemanfaatan Teknologi Informasi X ₃ = Tekanan Eksternal Objek Penelitian pada OPD Pemerintah Provinsi Papua, sedangkan pada penelitian ini hanya pada 1 OPD yaitu BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.	1. Kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2. Tekanan eksternal berpengaruh langsung secara positif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
7.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Fatimah, 2018)	X ₁ = Kompetensi Sumber Daya Manusia Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Z = Kinerja Keuangan	Menggunakan analisis linear berganda dengan uji instrumen, uji asumsi klasik dan uji hipotesis	Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	X ₁ = Kompetensi Sumber Daya Manusia Z = Kinerja Keuangan. Objek Penelitian pada SKPD Pemkot Cimahi, sedangkan pada penelitian ini berlokasi di OPD BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu 51,7%

Sumber: dari berbagai referensi, 2019

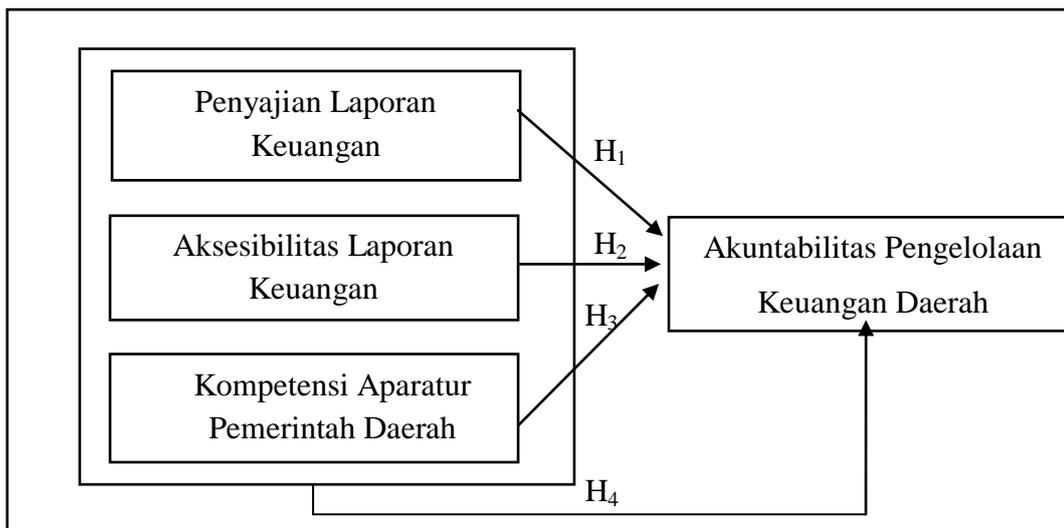
2.7 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis meneliti mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penyajian laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas sumber daya yang telah dikelolanya. Jika dikaitkan dengan konsep *agency theory* di sektor publik (Halim & Abdullah, 2006), pemerintah selaku *agent* berkewajiban untuk menyusun, menyajikan, melaporkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan oleh masyarakat (berupa pajak, retribusi, dan lain sebagainya). Dengan melakukan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP maka dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah seharusnya dapat memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik akan tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik (*Shende dan Bennet, 2004*) dalam (Anim dan Sutrisna, 2016). Dengan memberikan informasi kepada masyarakat dapat mengurangi permasalahan ketidakseimbangan informasi. Hal ini sesuai dengan teori signal yang telah dijelaskan penulis pada poin 7.1.2. Informasi laporan keuangan tersebut digunakan untuk mengetahui serta mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan pengelolannya.

Untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat maka diperlukan aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi Kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur pemda mulai dari pengetahuan yang memadai, skil yang mumpuni, serta pengalaman yang tinggi yang terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mendeskripsikannya dalam bentuk skematis kerangka pemikiran gambar 2. 1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:20) “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris”. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.8.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemerintah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan daerah karena itu merupakan suatu bentuk perwujudan akuntabilitas yang diberikan pemerintah kepada publik. Dalam konsep *agency theory* di sektor publik (Halim & Abdullah, 2006) menjelaskan bahwa pemerintah daerah selaku *agent* atau pemegang amanah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan oleh masyarakat yang dalam hal ini sebagai *principal* atau pemberi amanah.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sande (2013), Somad (2016) dan Anim&Sutrisna (2016) mengemukakan bahwa hasil dari penelitian tersebut adalah penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H₁ = Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

2.8.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik akan tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik (*Shende dan Bennet* dalam Anim&Sutrisna, 2016). Hal ini sejalan dengan teori signal yang dikeluarkan oleh *Spence* (1973) dalam Amalina (2018) yang menyatakan bahwa teori sinyal menjelaskan mengenai alasan pemerintah memberi informasi laporan keuangan kepada masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada masyarakat secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya. Dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengetahui ataupun memperoleh informasi keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Sande (2013), Somad (2016) dan Anim&Sutrisna (2016) mengemukakan bahwa hasil dari penelitian tersebut adalah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H₂ = Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

2.8.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemda terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2013 Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dan memadai diperlukan kompetensi aparatur pemerintah yang baik, mulai dari pengetahuan yang memadai, skil yang mumpuni, serta pengalaman yang tinggi. Dengan adanya aparatur pemerintah yang kompeten maka penyampaian laporan keuangan akan menjadi baik pula sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Kurnia, 2013).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asrida, Asnawi, & Fallah (2018) menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H₃ = Kompetensi aparatur pemda berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

2.8.4 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Sande (2013) Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melibatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. Pernyataan ini membuktikan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah

dituntut untuk menyajikan laporan keuangan dan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna untuk memperoleh informasi keuangan yang melibatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

H₄ = Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kompetensi aparatur pemda berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.